

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 1990 *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arba, H M, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria, Isi dan Implementasinya*, Djambatan, Jakarta
- Jaya, I Nyoman Budi, 1989, *Tinjauan Yuridis Tentang Retribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Liberty, Yogyakarta
- Lestari, Tri, 2009, *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Mustofa, Bachan, 1998, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remadja Karya, Bandung
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tim Dosen Metodologi Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, *Metodologi Penelitian*, Adibuana University Press, Surabaya
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

## B. Jurnal

Permatasari, elfira, Habib Adjie, Hardianto Djanggih, 2018, “Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan”, *Varia Justicia*, Vol. 14 No. 1

Jeine, Caroline, Noortje, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah *Absentee* Di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa”, 2020, *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Vol 16 No.5

## C. Tesis

Berlian Elisabeth Tumanggor, “Eksistensi Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan”, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2020

Dewi Larasati, “Eksistensi Tanah Absentee karena pewarisan di kabupaten Klaten”, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2019.

## D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Terjemahan R. Tjitrosudibio Subekti

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Perolehan Hak Atas Tanah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang. Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961 yang telah dicetak ulang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Th 1964 tentang perubahan dan tambahan PP 224 Th 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara Guntai bagi para Pensiunan Pegawai Negeri. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094 Tahun 1977.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

